

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI NAGARI SIRUKAM, KABUPATEN SOLOK

### Evaluation of the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Improving Housing Quality for Low-Income Communities (MBR) in Nagari Sirukam, Solok Regency

Angel Halsya Dwi Qalbi & M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

aghlsyqalbi@gmail.com; fachriadnan@fis.unp.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 22, 2025	Oct 14, 2025	Oct 26, 2025	Oct 31, 2025

#### Abstract

*Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya* (BSPS) program is a government initiative aimed at improving housing quality for low-income communities through self-help-based assistance. However, its effectiveness at the local level often faces challenges such as targeting inaccuracies and administrative limitations. This study seeks to evaluate the implementation of the BSPS program in Nagari Sirukam, Solok Regency, using William N. Dunn's policy evaluation framework and the evaluation standards of Mahesh Patel and Craig Russon, which include four aspects: utility, feasibility, propriety, and accuracy. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively and included program beneficiaries, village government officials, and Field Facilitators (TFL). The findings indicate that the implementation of the BSPS program in Nagari

Sirukam has been moderately successful, particularly in terms of transparency, community participation, and alignment with local cultural values such as *gotong royong*. However, challenges remain in targeting accuracy and administrative capacity, resulting in some low-income households not being accommodated as beneficiaries. These findings highlight the need for improvements in data accuracy, implementation oversight, and policy flexibility to ensure that the BSPS program becomes more targeted, inclusive, and socially equitable.

**Keywords:** BSPS; Policy Evaluation; Housing Quality; Low-Income Communities; Nagari Sirukam

**Abstrak:** Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan stimulan berbasis swadaya masyarakat. Namun, efektivitas implementasinya di tingkat lokal kerap mengalami kendala, seperti ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn serta standar evaluasi Mahesh Patel dan Craig Russon, yang mencakup empat aspek: *utility*, *feasibility*, *propriety*, dan *accuracy*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, melibatkan penerima manfaat, pemerintah nagari, serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan keselarasan dengan nilai budaya lokal seperti gotong royong. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek ketepatan sasaran dan keterbatasan administratif, yang menyebabkan sebagian MBR belum terakomodasi sebagai penerima bantuan. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan dalam akurasi pendataan, pengawasan pelaksanaan, dan peningkatan fleksibilitas kebijakan agar Program BSPS dapat lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan sosial.

**Kata Kunci:** BSPS; Evaluasi Kebijakan; Kualitas Hunian; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Nagari Sirukam

## PENDAHULUAN

Ketersediaan rumah layak huni tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan indikator kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam pembangunan nasional (Farida, 2020). Pembangunan perumahan dan permukiman berperan penting sebagai sarana tempat tinggal, pembentuk lingkungan sosial, serta pendorong aktivitas ekonomi masyarakat (Rajun et al., 2025). Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2023), tercatat

sekitar 26,9 juta rumah tangga belum menempati hunian layak, dan sebagian besar berasal dari kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR. Program ini mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat dan bersifat stimulan, yang berarti penerima bantuan diharapkan turut berpartisipasi secara aktif melalui kontribusi tenaga, bahan, atau dana swadaya (Kementerian PUPR, 2018). Dasar hukum pelaksanaan program ini tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018, yang mengatur dua bentuk bantuan, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs).

Salah satu wilayah pelaksana program ini adalah Nagari Sirukam di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penerima di daerah ini memperoleh jenis bantuan PKRS yang bertujuan memperbaiki rumah tidak layak huni. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, program ini telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala dan penyimpangan dari ketentuan kebijakan (Desyra et al., 2021).

Permasalahan yang muncul di lapangan antara lain ketidaktepatan sasaran, di mana terdapat penerima bantuan yang tidak sepenuhnya tergolong MBR, bahkan ditemukan penerima yang memiliki lebih dari satu rumah. Selain itu, kendala administratif seperti kepemilikan tanah yang belum bersertifikat serta keterbatasan kemampuan swadaya menyebabkan sebagian masyarakat miskin tidak dapat mengakses bantuan. Keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah pusat juga berdampak pada belum meratanya manfaat program, karena banyak keluarga yang memenuhi kriteria belum terakomodasi. Di sisi lain, pelaksanaan program belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal, seperti tradisi gotong royong *maulak rabo*, yang sebenarnya dapat mendukung efektivitas pelaksanaan BSPS (Pemerintah Nagari Sirukam, 2017). Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program dengan realitas di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten

Solok, dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mengacu pada empat standar evaluasi menurut Mahesh Patel dan Craig Russon , yaitu *Utility, Feasibility, Propriety, dan Accuracy*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, proses, serta kendala yang terjadi di lapangan secara kontekstual dan komprehensif. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai dari 2 September sampai 20 Oktober 2025, yang mencakup tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga analisis hasil penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, karena daerah ini merupakan salah satu wilayah pelaksana Program BSPS yang memiliki variasi dalam penerimaan manfaat program dan karakteristik sosial masyarakat yang beragam. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program BSPS jenis Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) yang berkaitan dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri atas aparaturnya pemerintah nagari, fasilitator lapangan BSPS, penerima manfaat program, serta tokoh masyarakat setempat yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan program. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan pelaksanaan BSPS, data BPS, serta literatur terkait kebijakan perumahan dan pemberdayaan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif dari (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya, objektif, dan menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam.

## HASIL

Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari Sirukam berfokus pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, khususnya pada kriteria ketepatan (*accuracy*). Kriteria ini merujuk pada empat standar evaluasi menurut Mahesh Patel dan Craig Russon, yaitu Standar Kegunaan (*Standards of Utility*), Standar Kelayakan (*Standards of Feasibility*), Standar Kepatutan (*Standards of Propriety*), dan Standar Ketepatan (*Standards of Accuracy*). Keempat standar ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program BSPS telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan serta kebutuhan nyata masyarakat di Nagari Sirukam.

### Standar Kegunaan (*Utility*)

Secara umum, Program BSPS memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Sirukam. Bantuan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga meningkatkan taraf hidup dan kenyamanan penerima manfaat. Salah seorang penerima bantuan, seorang Ibu menyampaikan dalam wawancara bahwa

*“sebelum dapat bantuan, atap rumah saya bocor dan dindingnya sudah rapuh. Setelah ada BSPS, rumah kami jadi lebih kuat dan nyaman ditempati.”*

Program ini juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat melalui kegiatan gotong royong selama proses pembangunan. Selain itu, keterlibatan pemerintah nagari dalam proses pengusulan dan pengawasan turut memperkuat fungsi pelayanan sosial di tingkat lokal. Namun demikian, manfaat program belum sepenuhnya merata karena kuota bantuan yang terbatas. Salah satu pengurus program menjelaskan bahwa,

*“masih banyak warga yang memenuhi syarat, tapi belum kebagian karena kuotanya sedikit dari pusat. Akan tetapi kami usabakan untuk segera kebagian karena kami sudah melakukan surat ke atasan agar ditambah”*

### Standar Kelayakan (*Feasibility*)

Dari aspek kelayakan, pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam telah mengikuti ketentuan dalam *Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018*. Proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, seperti Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pemerintah nagari, dan Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Kolaborasi antar pihak ini berjalan cukup baik dalam

tahap perencanaan, pengusulan, dan pelaksanaan pembangunan. Salah satu TFL, mengungkapkan bahwa

*“kami mendampingi penerima mulai dari survei awal sampai rumah selesai dibangun, termasuk membantu mereka dalam pencairan dana dan pembelian bahan.”*

Meskipun demikian, masih terdapat kendala administratif yang cukup signifikan, seperti kepemilikan tanah yang belum bersertifikat dan keterbatasan kemampuan swadaya masyarakat. Kondisi ini menyebabkan beberapa calon penerima yang sebenarnya layak tidak dapat memperoleh bantuan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi atau dana pendamping yang disyaratkan.

### **Standar Kepatutan (*Propriety*)**

Pelaksanaan Program BPS di Nagari Sirukam dinilai telah memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Tradisi gotong royong masyarakat Minangkabau, khususnya *maulak rabo* (kerja bersama dalam membangun rumah), menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Salah satu tokoh masyarakat di Desa, menyebutkan bahwa

*“meskipun bantuannya dari pemerintah, masyarakat tetap ramai-ramai membantu membangun rumah tetangga, karena itu sudah jadi kebiasaan di kampung kami.”*

Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara program pemerintah dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Namun demikian, masih terdapat persepsi ketidakadilan dari sebagian masyarakat non-penerima bantuan, terutama karena keterbatasan kuota dan syarat administratif yang ketat, sehingga menimbulkan pandangan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya adil.

### **Standar Ketepatan (*Accuracy*)**

Secara umum, pelaksanaan Program BPS di Nagari Sirukam dapat dikategorikan sudah cukup tepat sasaran. Mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan. Program ini berhasil mencapai tujuan kebijakan dalam meningkatkan kualitas hunian serta memberdayakan masyarakat melalui prinsip swadaya. Kendati demikian, masih ditemukan beberapa penerima yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penerima bantuan, misalnya memiliki lebih dari satu rumah atau tingkat

ekonomi yang relatif lebih baik dibanding penerima lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi data agar pelaksanaan program di masa mendatang lebih akurat dan adil. Berikut gambaran dari penjelasan diatas:

**Tabel 1.** Ringkasan hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

No.	Standar Evaluasi	Hasil Temuan Lapangan	Keterangan Pendukung (Hasil Wawancara)
1	Standar Kegunaan ( <i>Utility</i> )	Program meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan MBR, namun manfaat belum merata karena bocor lagi. kuota terbatas.	“Rumah saya kini lebih kuat dan tidak bocor lagi.”
2	Standar Kelayakan ( <i>Feasibility</i> )	Pelaksanaan sesuai regulasi, melibatkan TFL dan pemerintah nagari, namun terkendala administrasi tanah belum bersertifikat. dan swadaya masyarakat.	“Banyak warga layak tapi gagal karena tanah belum bersertifikat.”
3	Standar Kepatutan ( <i>Propriety</i> )	Program selaras dengan budaya gotong royong ( <i>maulak rabo</i> ), tapi muncul persepsi ketidakadilan akibat keterbatasan kuota.	“Kami bantu bangun rumah tetangga karena itu sudah adat kami.”
4	Standar Ketepatan ( <i>Accuracy</i> )	Sebagian besar penerima sesuai kriteria, namun masih ditemukan penerima yang tidak sesuai karena memiliki rumah lebih dari satu	“Verifikasi data kadang belum sempurna karena waktu terbatas, sehingga ada yang sesuai dan ada yang kurang sesuai seperti memiliki dua rumah”

Berdasarkan table 1 hasil evaluasi yang ditunjukkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam secara umum berjalan cukup efektif dan sesuai tujuan kebijakan, terutama dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini terbukti bermanfaat secara sosial dan ekonomi, memperkuat nilai gotong royong, serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala administratif, keterbatasan dana swadaya, dan ketidaktepatan sasaran pada beberapa penerima bantuan. Sehingga dari tersebut penting adanya evaluasi dan juga perbaikan kedepannya.

## PEMBAHASAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program

BSPS di Nagari Sirukam telah menunjukkan hasil yang cukup baik, baik dari segi teknis, sosial, maupun administratif. Program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memperbaiki kondisi hunian yang sebelumnya tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Lufti et al., 2023) yang menyatakan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks lokal Nagari Sirukam, keberadaan BSPS tidak hanya memperbaiki infrastruktur rumah, tetapi juga mendorong peningkatan partisipasi sosial masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif ketika dikombinasikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya local, sehingga itu, pelaksanaan BSPS di Nagari Sirukam dapat dikategorikan efektif dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan komunitas.

Mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam (Mamahit et al., 2021), bahwa pelaksanaan BSPS di Nagari Sirukam dapat dianalisis menggunakan empat standar evaluasi kebijakan, yaitu *Utility*, *Feasibility*, *Propriety*, dan *Accuracy*. Standar Kegunaan (*Utility*) menilai sejauh mana program memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan Standar Kelayakan (*Feasibility*) melihat kemampuan program dijalankan secara teknis dan administratif. Standar Kepatutan (*Propriety*) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan norma sosial dan etika, sementara Standar Ketepatan (*Accuracy*) mengukur ketepatan sasaran kebijakan terhadap tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, BSPS di Nagari Sirukam menunjukkan kinerja yang positif pada aspek *Feasibility* dan *Propriety*, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek *Utility* dan *Accuracy*. Hal ini berarti bahwa meskipun program telah memberikan manfaat nyata, proses seleksi penerima dan pemerataan bantuan masih memerlukan penyempurnaan. Dengan demikian, evaluasi menggunakan kerangka Dunn ini menjadi relevan dalam menilai keberhasilan implementasi program perumahan berbasis masyarakat (Chairun & Yakobus, 2024).

Dalam konteks Standar Kegunaan (*Utility*), hasil penelitian menunjukkan bahwa BSPS di Nagari Sirukam memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang semula tidak layak huni kini menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat bagi penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sattarudin, 2019) yang menekankan bahwa peningkatan kualitas perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan produktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan, mereka merasakan perubahan signifikan setelah rumah diperbaiki, baik dari segi

kenyamanan maupun kesehatan lingkungan. Selain itu, program ini juga memperkuat hubungan sosial antarwarga melalui kerja sama dalam proses pembangunan rumah. Namun demikian, manfaat program belum dirasakan secara merata karena keterbatasan kuota bantuan yang menyebabkan masih banyak masyarakat miskin yang belum terakomodasi. Maka dari itu, dari aspek *Utility*, pelaksanaan BSPS perlu ditingkatkan cakupan dan daya jangkauannya agar manfaatnya lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Dari aspek Standar Kelayakan (*Feasibility*), pelaksanaan BPS di Nagari Sirukam telah sesuai dengan ketentuan dalam *Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018*. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, verifikasi data, hingga pembangunan, dilaksanakan melalui kerja sama antara Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pemerintah nagari, dan Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Sinergi antara ketiga pihak ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan dengan baik. Menurut (Tresiana & Duadji, 2021), efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat kolaborasi antar aktor pelaksana. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, karena keterlibatan aktif aparat nagari dan TFL mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala administratif, seperti status kepemilikan tanah yang belum bersertifikat dan keterbatasan dana swadaya masyarakat. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan kelayakan teknis dan administratif secara penuh sehingga pentingnya pengelolaan dan manajemen yang sesuai dan berkelanjutan (Jazuli et al., 2023).

Pelaksanaan BPS di Nagari Sirukam juga dinilai sesuai dengan Standar Kepatutan (*Propriety*), karena mampu beradaptasi dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal masyarakat Minangkabau. Salah satu bentuk adaptasi tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat melalui kegiatan *manlak rabo* atau gotong royong dalam membangun rumah penerima bantuan. Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dan memperlihatkan bahwa program pemerintah dapat diterima dengan baik apabila sejalan dengan norma budaya setempat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Kadji, 2015; Sherly, 2022) yang menegaskan bahwa kebijakan publik yang berakar pada nilai lokal akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan BPS juga memperlihatkan bahwa masyarakat Nagari Sirukam memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dalam membantu sesama warga. Walaupun begitu, sebagian masyarakat non-penerima masih merasakan adanya ketidakadilan karena keterbatasan kuota dan syarat administratif yang ketat. Dengan

demikian, program perlu memperkuat aspek transparansi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap keadilan distribusi bantuan.

Dari hasil analisis Standar Ketepatan (*Accuracy*), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BPS di Nagari Sirukam sudah cukup tepat sasaran, karena sebagian besar penerima bantuan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rumah tidak layak huni. Temuan ini sesuai dengan kriteria penerima yang diatur dalam *Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2018*. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kasus di mana penerima bantuan tidak sepenuhnya memenuhi kriteria, seperti memiliki lebih dari satu rumah atau tingkat ekonomi yang lebih baik dibanding warga lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi data di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Desyra et al., 2021; Puryanto & Rosadi, 2021) yang menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran masih menjadi persoalan umum dalam pelaksanaan BPS di beberapa daerah di Sumatera Barat. Dengan itu, diperlukan peningkatan sistem pendataan berbasis digital dan koordinasi dengan instansi kependudukan untuk memperkuat akurasi data calon penerima bantuan.

Faktor kolaborasi antara pemerintah nagari, TFL, dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan BPS di Nagari Sirukam. Pemerintah nagari berperan penting dalam mendata masyarakat calon penerima bantuan, sementara TFL bertanggung jawab dalam pendampingan teknis dan administrasi. Kolaborasi ini memperlihatkan adanya sinergi yang baik antaraktor kebijakan di tingkat lokal. Menurut Edwards III dalam (Romadhon et al., 2021), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang jelas. Dalam konteks BPS di Nagari Sirukam, ketiga faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik meskipun masih terdapat kendala administratif yang bersifat teknis. Sehingga itu, peningkatan kapasitas TFL serta pelatihan bagi aparatur nagari menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program perumahan di masa mendatang.

Kendala utama dalam pelaksanaan program BPS di Nagari Sirukam terletak pada aspek administratif dan kemampuan swadaya masyarakat. Beberapa calon penerima bantuan tidak dapat mengikuti program karena tidak memiliki sertifikat tanah, padahal mereka termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan realitas sosial di daerah. Menurut teori kebijakan publik (Kiwang et al., 2015), kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan kemampuan

adaptasi terhadap konteks sosial dan ekonomi masyarakat penerima. Dalam hal ini, BSPS perlu mengembangkan mekanisme alternatif seperti surat keterangan tanah dari pemerintah nagari sebagai bentuk legalitas sementara agar masyarakat yang memenuhi syarat sosial tetap bisa menerima bantuan. Dengan demikian, pelaksanaan program akan lebih inklusif dan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dari perspektif sosial, pelaksanaan BPS di Nagari Sirukam telah memberikan dampak positif terhadap solidaritas dan partisipasi masyarakat. Program ini mendorong semangat gotong royong dan kemandirian melalui konsep *swadaya masyarakat*. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif yang dijelaskan oleh Chambers dalam (Akbar et al., 2018; Samaun et al., 2022) bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung akan lebih berkelanjutan karena masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap hasilnya. Melalui kegiatan *maulak rabo*, masyarakat tidak hanya membantu proses pembangunan rumah, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antarwarga. Dampak ini memperlihatkan bahwa BPS tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial yang memperkuat kohesi masyarakat. Oleh karena itu, program ini layak dipertahankan sebagai bentuk intervensi sosial yang menggabungkan aspek kesejahteraan dan pemberdayaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BPS di Nagari Sirukam telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi menggunakan teori William N. Dunn membuktikan bahwa BPS telah memenuhi aspek *Feasibility* dan *Propriety*, namun perlu peningkatan pada aspek *Utility* dan *Accuracy*. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penyempurnaan mekanisme verifikasi data penerima, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, keberhasilan BPS di masa mendatang tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Hal ini selaras dengan pandangan Dunn bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada kemampuan adaptifnya terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang dilayani.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) di Nagari

Sirukam, Kabupaten Solok, secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memenuhi sebagian besar kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, terutama pada aspek kelayakan (*feasibility*) dan kepatutan (*propriety*) yang tercermin dari pelaksanaan program yang transparan, partisipatif, serta berlandaskan nilai-nilai sosial dan budaya lokal seperti gotong royong (*maulak rabo*). Meskipun demikian, pada aspek ketepatan (*accuracy*) dan kegunaan (*utility*) masih ditemukan kelemahan, terutama dalam hal validitas data penerima bantuan dan pemerataan manfaat program. Beberapa masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan belum terakomodasi karena kendala administratif dan keterbatasan kemampuan swadaya. Maka dari itu, diperlukan peningkatan dalam proses verifikasi data, pengawasan pelaksanaan, serta penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, BSPS di Nagari Sirukam telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun masih memerlukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya memberikan pemahaman empiris dan konseptual mengenai efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok. Penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian akademik dalam bidang kebijakan publik dan perumahan rakyat, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan Kementerian PUPR dalam memperbaiki mekanisme implementasi program serupa di masa mendatang. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan standar evaluasi Mahesh Patel serta Craig Russon, penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan pentingnya aspek ketepatan sasaran, kelayakan pelaksanaan, dan kesesuaian sosial budaya dalam program pembangunan berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini juga menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan sistem pendataan penerima bantuan, memperkuat pengawasan pelaksanaan, serta memperluas cakupan penerima agar manfaat program lebih merata. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai landasan ilmiah dan rekomendatif dalam mewujudkan kebijakan perumahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) memperluas ruang lingkup kajian dengan melibatkan wilayah atau nagari lain agar dapat dilakukan perbandingan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di berbagai konteks

sosial dan geografis. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) guna memperoleh data yang lebih terukur mengenai tingkat kepuasan penerima bantuan, dampak sosial-ekonomi, serta efektivitas kebijakan secara keseluruhan. 3) Menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran program, seperti sistem verifikasi data, koordinasi antarinstansi, dan peran pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan. Dengan demikian, hasil penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan perumahan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Chairun Nisa, & Yakobus Ndoda. (2024). Konsep Kesejahteraan Sosial Menurut Masyarakat Melayu Di Batubara. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3), 174–183. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3763>
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 110. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/36273/33776>
- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 78. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3132>
- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoiroth Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kementerian PUPR. (2018). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 71. <https://doi.org/10.22146/jkap.7535>
- Lufti, R., Suryani, N., & Pratama, F. M. (2023). Space requirements and building form studies for low income housing community. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 6(2), 221. <http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/lakar/article/view/18964>

- Mamahit, C., Nayoan, H., & Monintja, D. K. (2021). Evaluasi Kebijakan Teori William N. Dunn dalam Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. *Governance*, 1(2), 49. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36125>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Pemerintah Nagari Sirukam. (2017). *Profil Nagari Sirukam*. Nagari Sirukam. <https://www.scribd.com/Document/638400430/Profil-Nagari-Sirukam>
- Puryanto, P., & Rosadi, R. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 85–91. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.751>
- Rajun, P. S., Amir, M., & Makmur, M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni. *Trajectories of Public Administration*, 2(2), 187. <https://trajectories.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/75>
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115. <https://doi.org/10.31949/jee.v4i1.3085>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Sattarudin, M. (2019). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menciptakan Rumah Layak Huni pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 4(1), 28. <https://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2019/09/11uu001>.
- Sherly, O. P. (2022). *Dinamika Kehidupan Buruh Tani Perempuan di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok Tahun 2010–2021* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/107229/>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi). In *suluhmedia*. Suluhmedia.